

Ideal Komunikasi Dalam Dimensi: Dimensi Authoritarianism dan Dimensi Libertarianism (Analisis Hubungannya dengan Teori Kepemimpinan)

Fauzan

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: fauzan@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Dimensi Authoritarianism dan Dimensi Libertarianism dan hubungannya dengan teori kepemimpinan. Ini termasuk kajian *library research*. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Teori kepemimpinan yang mengutamakan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak, seperti teori kepemimpinan partisipatif (*participative leadership*) dan teori kepemimpinan servan (*servant leadership*), dapat dilihat sebagai sejalan dengan prinsip libertarianisme. Teori kepemimpinan partisipatif mengutamakan partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan, sehingga anggota tim merasa memiliki tanggung jawab dan kebanggaan atas hasil yang dicapai. Prinsip ini sejalan dengan prinsip libertarianisme yang menempatkan kebebasan individu dalam mengambil keputusan sebagai hal yang sangat penting. Sementara itu, teori kepemimpinan servan menempatkan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan anggota tim, bukan hanya kepentingan pemimpin. Pemimpin sebagai pelayan (*servant*) yang mengabdikan pada kepentingan anggota tim, sehingga anggota tim merasa dihargai dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip libertarianisme yang menempatkan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai hal yang sangat penting. Secara keseluruhan, prinsip libertarianisme dapat menjadi dasar dalam membangun teori kepemimpinan yang mengutamakan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak, serta memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan anggota tim.

Kata Kunci: *Authoritarianism, Libertarianism, Kepemimpinan*

PENDAHULUAN

Paham libertarianisme muncul sebagai reaksi penolakan terhadap paham otoriterisme pada akhir abad ke-17. Kaum libertarian berpendapat bahwa sifat alami individu untuk mencari kebenaran untuk mendapatkan kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik. Pencarian kebenaran ini harus diwujudkan melalui kebebasan berpendapat dan berdebat mengenai "truth" ini sendiri melalui proses

self righting.¹

Menurut John Milton, libertarian vokal pada 1644 menyatakan bahwa debat yang adil dan terbuka, kebenaran dan argumen yang jujur akan selalu menang dibandingkan kebohongan.² Libertarian theory menjadi dasar modifikasi social responsibility theory, dan merupakan kebalikan dari Authoritarian Theory dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan. Kebenaran bukan lagi milik kodrati manusia. Dan pers dianggap partner dalam mencari kebenaran.

Hubungan antara libertarianisme dengan teori kepemimpinan dapat dilihat dari perspektif bahwa paham ini menempatkan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai hal yang sangat penting. Dalam konteks kepemimpinan, teori kepemimpinan yang mengutamakan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak, seperti teori kepemimpinan partisipatif (*participative leadership*) dan teori kepemimpinan servan (*servant leadership*), dapat dilihat sebagai sejalan dengan prinsip libertarianisme.

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang Dimensi Authoritarianism dan Dimensi Libertarianism dan hubungannya dengan teori kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan atau "library research" adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, buku, laporan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengeksplorasi topik tertentu dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada. Penelitian kepustakaan dapat menjadi metode penelitian utama atau mendukung metode penelitian lain. Dalam pembangunan kerangka teoritis dan evaluasi hasil

¹ Baran, Staley. D & Davis, Denis. K. (2012). *Mass Communication Theory, Foundation, 2012*, h. 103.

² Baran, Staley. D & Davis, Denis. K. (2012). *Mass...*, h. 102.

penelitian, penelitian kepustakaan sangat berguna. Menurut Sugiono (2016), metode ini dapat digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dimensi Libertarianism

Konsep Libertarian lebih banyak berkembang di negara-negara anglo saxtion ketimbang kontinental. Perkembangan di anglo saxtion lebih bersifat empiris atau berada dalam “Das Sein”. Ilmu komunikasi dengan sebutan *Science of communication* berawal dari *science of journalism* yaitu pada bidang jurnalistik (*science of journalism*). Terutama yang bergerak di dalam bidang media massa khususnya bidang pers. Di Jerman perkembangan ini berawal dari sebutan “Acta Diurna”. Di Amerika Serikat temuan di bidang teknologi komunikasi seperti radio, televisi dan film maka ilmu komunikasi berubah menjadi *science of communication*.

Kembali kepada pokok bahasan bahwa perkembangan konsep libertarianism merupakan sebagian dari konsep demokrasi. Joseph Schumpeter (1883-1950) memberi karakter apa yang dimaksud “demokrasi liberal” sebagaimana yang diangkat dalam bukunya berjudul “*Capitalism, Socialism and Democracy*”. Demokrasi (=demokrasi liberal) tulis Schumpeter, muncul dengan sistem ekonomi kapitalis. Peran rakyat dalam suatu masyarakat demokrasi adalah tidak untuk memerintah, atau bahkan untuk menjalankan keputusan- keputusan umum atau kebijakan politik. Peran rakyat melalui pemilihan umum (pemilihan umum salah satu ciri demokrasi) adalah untuk menghasilkan suatu pemerintahan atau badan lainnya.

Bagi Schumpeter demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan atau pemberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan pula seperangkat tujuan moral.

Demokrasi liberal menandai suatu masyarakat yang kompetitif, individualis, berekonomi pasar, dan bekerjanya negara liberal, yang melayani masyarakat tersebut dengan sistem kompetisi partai.

Pemikiran-pemikiran tentang demokrasi dari para filosof mengilhami para

ilmuwan komunikasi di dalam mengembangkan sistem libertarianism sebagai jawaban terhadap sistem authoritarianism.

Sistem liberartarianism muncul karena revolusi berpikir manusia yang bersifat sekularisme yaitu pergeseran dari teologi dari dunia “sain”. Sebagaimana yang diungkapkan di atas hal ini berlangsung di awal abad ke-17 . dalam bidang komunikasi sistem libertarianism terdapat dalam Dokumen Anti Authoritarianism yaitu pada Milton’s Aeropagatica.

Sistem liberatarianism berdasar suatu argumentasi bahwa manusia dapat membedakan antara yang benar (*right*) dengan salah (*wrong*) antara yang baik dan yang buruk. Menurut Milton bahwa manusia mempunyai pilihan alternatif yang berdasar nilai-nilai normatif. Karena itu, manusia sebagai individu yang dapat berdiri sendiri dan rasional.

Sumber-sumber komunikasi tidak berada dalam suatu tangan, hal ini sesuai pemisahaan kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi kekuasaan, yaitu : Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Elit berkuasa dalam menentukan kebijakan komunikasi pemerintah (dalam arti luas) merupakan produk jalinan komunikasi fungsional antar lembaga otoritas. Norma-norma yang dibentuk lembaga legislatif merupakan landasan sikap perilaku individu-individu (sebagai penguasa dan sebagai anggota masyarakat) di dalam kehidupan bernegara. Hal ini mengandung makna bahwa sistem libertarianism menempatkan hukum pada tangga utama sebagai unsur yang mengayomi aktivitas dan dinamika masyarakat. Penempatan hukum pada tangga utama memberi isyarat bahwa sistem libertarianism sebagai sistem kekuasaan yang berdasar pada hukum atau disebut juga “*the governmental under the rule of law*” dalam rangka melindungi HAM. Apa yang dibentuk oleh lembaga-lembaga perwakilan pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hak asasi sebagai hak yang dimiliki oleh individu-individu manusia, baik secara perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dibawa sejak manusia lahir.

Hak asasi kalau diklasifikasikan dapat dibagi dua yaitu hak yang bersifat absolut dan hak asasi bersifat nisbi.

Dalam sejarah perkembangannya, hak asasi melalui proses penahapan,

karena perumusan hak asasi tidak langsung seperti selengkap sekarang. Hak asasi yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 semuanya bersifat politik dan banyak dipengaruhi oleh gagasan hukum alam (*natural law*). Seperti yang dirumuskan oleh Jhon Locke (1632-1714) dan J.J.Rousseau (1712-1778). Usaha-usaha untuk merumuskan hak asasi, ini dimulai dari eropa barat. Berulangkali upaya ini dilaksanakan untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hal yang dianggap suci.

Perkembangan Dimensi Authoritarianism

Teori otoritarian, merupakan teori normative yang menempatkan semua bentuk komunikasi dibawah kontrol elit pemerintah/otoritas. Teori ini pada mulanya berkembang di negara-negara monarki di Eropa, dimana kerajaan dan gereja merupakan otoritas tertinggi di suatu negara. Aplikasi teori ini dimulai pada abad 16 di Inggris, Perancis, dan Spanyol, yang pada zaman berikutnya meluas ke Rusia, Jerman, Jepang, dan Negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin.

Pada mulanya, teori otoritarian ingin menciptakan kondisi ideal melalui informasi yang disaring oleh pemegang otoritas (pada umumnya Raja/petinggi negara atau pihak yang diatur dalam peraturan sebagai praktisi media) dengan tujuan melindungi dan memelihara tatanan sosial (Baran & Davis, 2012: 102).

Namun pada perkembangannya, pers otoritarianisme menjadi suatu bentuk perangkat penekanan dan ketertundukan kepada pemerintah. Di dalam teori ini sensor dan hukuman dari pedoman yang telah ditetapkan berlaku untuk hal hal yang sifatnya politis atau segala sesuatu yang memiliki ideologi jelas.

Model komunikasi yang terjadi pada paham otoritarianisme adalah komunikasi satu arah. Dalam menjalankan tugasnya baik dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, dan pesan, orang otoritarian hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Bentuk komunikasi yang persuasif untuk meyakinkan, dinilai menghabiskan waktu dan tidak efisien. Meski kebebasan bersuara dibatasi, namun selama pandangan (termasuk kaum minoritas) yang dikemukakan tidak mengancam pemerintahan masih diperbolehkan.

Teori otoriter yang acapkali disebut pula sistem otoriter berkaitan erat dengan system pengawasan terhadap media massa yang daya pengaruhnya dinilai amat kuat, sehingga pers dijuluki the fourth estate (kekuasaan keempat) dan radio siaran dijuluki the fifth estate (kekuasaan kelima) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masing-masing diakui sebagai kekuasaan pertama, kedua dan ketiga.

Menurut Fred S. Siebert teori otoriter menyatakan bahwa hubungan antara media massa dengan masyarakat ditentukan oleh asumsi-asumsi filsafati yang mendasar tentang manusia dan negara. Dalam hal ini tercakup: (1) sifat manusia, (2) sifat masyarakat, (3) hubungan antara manusia dengan negara, dan (4) masalah filsafati yang mendasar, sifat pengetahuan dan sifat kebenaran.

Teori otoriter mengenai fungsi dan tujuan masyarakat menerima dalil-dalil yang menyatakan bahwa pertama-tama seseorang hanya dapat mencapai kemampuan secara penuh jika ia menjadi anggota masyarakat. Sebagai individu lingkup kegiatannya benar-benar terbatas, tetapi sebagai anggota masyarakat kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan dapat ditingkatkan tanpa batas. Atas dasar asumsi inilah, kelompok lebih penting daripada individu, karena hanya melalui kelompok seseorang dapat mencapai tujuannya.

Teori tersebut telah mengembangkan proposisi bahwa negara sebagai organisasi kelompok dalam tingkat paling tinggi telah menggantikan individu dalam hubungannya dengan derajat nilai, karena tanpa negara seseorang tak berdaya untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia beradab. Kebergantungan seseorang pada negara untuk mencapai peradaban telah menjadi unsur utama bagi sistem otoriter. Saat ini penyensoran, baik oleh pemerintah maupun swasta, masih hidup dan berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk yang menyatakan yang menganut demokrasi. Misalnya perselisihan yang sering terjadi antara wartawan dengan pemerintahan Singapura yang terkenal dengan kontrol media yang ketat dimana petugas berwenang melakukan sensor atau pengeditan pada program dan pengeditan. Harian seperti *Asian Wall Street Journal*, *Far Eastern Economic Review*, dan *International Herald Tribune*

merupakan harian yang pernah berselisih dengan pemerintah Singapura, dan harus membayar denda serta menghadapi kontrol yang ketat.

Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan berdasarkan pendekatan perilaku, terkadang tidak didasarkan pada sifat atau ciri-ciri kepribadian seseorang, tapi lebih cenderung berdasarkan perilaku atau proses kepemimpinan yang ditunjukkan dalam organisasi yang dipimpin. Kualitas kepemimpinan tidak dinilai dari karakter personal, tapi lebih ditekankan pada fungsi, peranan, atau perilaku yang ditampilkan dalam kelompok. Salah satu teori kepemimpinan yang dikembangkan berdasarkan perilaku adalah teori kepemimpinan dua dimensi (*two dimensional theory*).

Cartwright dan Zander menggunakan istilah pencapaian tujuan (*goal achievement*), dan pertahanan kelompok (*group maintenance*). Halpin dan Winner mengemukakan dengan istilah struktur inisiasi (*initiating structure*) dan konsiderasi (*consideration*). Danil Cartz menyebut dengan istilah orientasi pada produksi (*production oriented*) dan orientasi pada pekerja (*employee oriented*). Likert menyebut dengan istilah berpusat pada tugas (*job centered*) dan berpusat pada pekerja (*employee centered*). Blake dan Mouton menggunakan istilah perhatian pada aspek hasil (*concern for production*) dan perhatian pada aspek manusia (*concern for people*).³

Berdasarkan teori kepemimpinan di atas, dimana bentuk penekanannya dapat dibaca lebih cenderung menitikbertakan kepada peningkatan keberhasilan kepemimpinan yang ditentukan melalui perilaku pemimpin dan faktor-faktor situasional organisasi, seperti jenis pekerjaan, lingkungan organisasi, dan karakteristik individu yang terlibat dalam organisasi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua organisasi. Kepemimpinan yang efektif adalah perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik organisasi, terutama kondisi kematangan bawahan.

³W.K. Hoy & C.G. Miskel, *Educational Administration...*, hlm. 116.

Pada perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditekankan pada perilaku yang ditampilkan pimpinan dalam kelompok, tetapi perlu ditelaah dari sisi perilaku yang ditampilkan anggota dalam organisasi. Untuk itu, pimpinan harus bisa mentransformasi nilai kepada bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu pendekatan kepemimpinan yang dikembangkan adalah kepemimpinan transformasional.

Dalam mengelola pendidikan dayah, pimpinan dayah bisa memilih teori dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dari beberapa gaya kepemimpinan yang ada sesuai dengan karakter pribadi, dan kondisi organisasi dayah yang dipimpin. Yang terpenting, bahwa pimpinan dayah harus bisa menampilkan peranan kepemimpinan yang baik. Berkaitan dengan peranan kepemimpinan tersebut, U. Usman mengemukakan enam peranan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan formal, kepemimpinan administratif, kepemimpinan supervisi, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan tim.⁴

Adapun kepemimpinan formal mengacu pada tugas pimpinan dayah untuk merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlaku. Kepemimpinan administratif, mengacu pada tugas pimpinan dayah untuk membina administrasi seluruh staf dan anggota organisasi sekolah. Kepemimpinan supervisi mengacu pada tugas pimpinan dayah untuk membantu dan membimbing anggota agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kepemimpinan organisasi mengacu pada tugas pimpinan dayah untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, sehingga anggota bisa bekerja dengan penuh semangat dan produktif. Kepemimpinan tim mengacu pada tugas pimpinan dayah untuk membangun kerja sama yang baik diantara semua anggota agar bisa mewujudkan tujuan organisasi pendidikan dayah secara optimal.⁵

Terdapat beberapa teori kepemimpinan yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

⁴U. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 1991), hlm. 50-51.

⁵U. Usman, *Menjadi Guru...*, h. 51.

1. Teori Sifat.

Teori ini ingin berusaha mencari format untuk mengidentifikasi karakteristik ikhlas (fisik, mental, dan kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin.⁶

2. Teori Kepribadian

Di akhir tahun 1940-an para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Dan mereka menemukan sifat-sifat, mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Teori perilaku ini didasarkan pada hukum pengaruh (*law effect*) yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi memuaskan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang.⁷

3. Teori Kepemimpinan Situasional

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.⁸ Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Kartini Kartono bahwasannya terdapat sejumlah teori kepemimpinan sebagai berikut:⁹

⁶Veithzal Rivai Zainal, et.all, *Kepemimpinan...*, hlm. 7.

⁷Veithzal Rivai Zainal, et.all, *Kepemimpinan...*, hlm. 7.

⁸Husaini Usman, Manjemen, *Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 265-266.

⁹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan...*, hlm. 72.

3. Teori Otokratis

Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan yang *arbitrer* (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.

4. Teori Psikologis

Teori ini menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik, untuk merangsang kesediaan bekerja dari para pengikut dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan agar mereka mau bekerja guna mencapai sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi.

5. Teori Sosiologis

Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya, agar tercapai kerja sama yang baik. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikutnya dalam pengambilan keputusan terakhir. Selanjutnya, juga mengidentifikasi tujuan, dan kerap kali memberikan petunjuk yang diberlakukan bagi para pengikut untuk melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompoknya. Setiap anggota mengetahui hasil apa, keyakinan apa, dan kelakuan apa yang diharapkan dari mereka oleh pimpinan dan kelompoknya. Pemimpin diharapkan dapat mengambil tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kepincangan-kepincangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi.¹⁰

6. Teori Suportif

Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin, dan bekerja dengan penuh gairah, sedang pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya melalui *policy* tertentu. Untuk maksud ini pemimpin perlu menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan, dan bisa membantu mempertebal keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik

¹⁰Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan...*, hlm. 72.

mungkin, sanggup bekerjasama dengan pihak lain, mau mengembangkan bakat dan keterampilannya, dan menyadari benar keinginan sendiri untuk maju.¹¹

7. Teori *Laissez Faire*

Kepemimpinan *laissez faire* ditampilkan oleh seorang tokoh “ketua dewan” yang sebenarnya tidak becus mengurus dan dia menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua anggotanya. Dia adalah seorang “ketua” yang bert indak sebagai simbol, dengan macam-macam hiasan atau ornamen yang mentereng. Biasanya dia tidak memiliki keterampilan teknis. Sedangkan kedudukan sebagai pimpinan (direktur, ketua dewan, kepala, komandan, dan lain-lain) dimungkinkan oleh sistem nepotisme atau lewat praktik penyuapan.

8. Teori Kelakuan Pribadi

Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau pola-pola kelakuan para pemimpinnya. Teori ini menyatakan, bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, dia harus mampu bersikap fleksibel, luwes, bijaksana, “tahu gelagat”, dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena dia harus mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk sesuatu masalah. Sedangkan masalah sosial itu tidak akan pernah identik sama di dalam runtutan waktu yang berbeda.¹²

9. Teori Situasi.

Teori ini menjelaskan bahwa harus terdapat daya pikir yang tinggi/luwes, pada pemimpin untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi, lingkungan sekitar dan zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan tantangan untuk diatasi. Maka pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah-masalah aktual. Sebab permasalahan-permasalahan hidup dan saat-saat krisis (perang, revolusi, dan lain-lain) yang penuh pergolakan dan ancaman bahaya, selalu akan memunculkan satu tipe kepemimpinan yang relevan bagi masa itu. Dengan

¹¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan...*, hlm. 75.

¹²Kartini Kartono, *Pemimpinan dan Kepemimpinan...*, hlm. 75.

menganalisis motivasi pada bawahannya, pemimpin dapat menempatkan pada posisi yang sesuai. Kualitas hubungan antara pemimpin dengan anggotanya akan berpengaruh pada keefektifan kepemimpinannya sehingga kepemimpinannya tidak perlu mendasarkan pada kekuasaan formalnya.

10. Teori *humanistic/populistik*

Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah merealisasikan kebebasan manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insani, yang dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. Untuk melakukan hal itu perlu adanya organisasi yang baik dan pemimpin yang baik, yang mau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai sarana untuk melakukan control sosial, agar pemerintah melakukan fungsinya dengan baik, serta memperhatikan kemampuan dan potensi rakyat. Semua itu dapat dilaksanakan melalui interaksi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat, dengan memperhatikan kepentingan masing-masing.

Proses Komunikasi Berlangsung Berdasar Norma-Norma Komunikasi (Hukum-Hukum Komunikasi)

Dalam kajian teoritis bahwa proses komunikasi yang efektif apabila terjadi proses saling merespons antara komunikator dan komunikan, sehingga tujuan komunikasi tercapai.

Terjadinya saling merespons mengandung makna bahwa komunikasi ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek, sehingga komunikator tidak memproyeksikan pribadinya terhadap diri komunikan. Hal ini sesuai pemikiran Sean Mc Bride dalam judul bukunya *Many Voices One World Communication to Day and Tomorrow*, yaitu tentang demokratisasi komunikasi. Menurut Bride demokratisasi komunikasi dirumuskan sebagai berikut *Pertama*, setiap individu dijadikan patner bukan sebagai objek saja. *Kedua*, meningkatnya pesan yang dipertukarkan. *Ketiga*, mendorong perkembangan dan kualitas komunikasi yang diwakili masyarakat. (Bride, 1980:166).

Unsur pertama dari Bride memunculkan karakter bahwa sistem *demokrasi* (demokrasi liberal) menempatkan individu-individu pada derajat yang sama di

dalam melakukan kegiatan komunikasi. Setiap individu mengaitkan berbagai kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sifat-sifat saling mendominasi tergeser oleh saling membutuhkan.

Unsur kedua yang diangkat bride menunjukkan bahwa proses komunikasi secara normatif, memenuhi hukum-hukum komunikasi yaitu berlangsungnya suatu *siklus* yang tidak terputus selama tujuan komunikasi belum tercapai.

Nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dapat pula didekati dengan *Teori Perbedaan Individual (Individual Difference Theory)*. Menurut teori ini individu-individu sebagai anggota khalayak menaruh perhatian kepada pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingannya. Atau dapat pula didekati dengan *Teori Kategori Sosial (Social Categories Theory)*. Karakter yang muncul dalam teori ini yaitu pengakuan akan peranan pola-pola interaksi antar anggota khalayak sasaran. Sedangkan yang berkait dengan nilai-nilai normatif atau pola-pola kebudayaan dapat didekati dengan *Teori Norma Budaya (Cultural Norms Theory)*. Teori ini memperhatikan terhadap nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dapat dibentuk atau diubah kepada budaya baru.

Apa yang diangkat berdasar teori-teori tersebut untuk menunjukkan bahwa sistem lebertarianism pada hakikatnya memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga *feedback* atau *respons* dalam bentuk pendapat, kritik, saran, konsep pemikiran merupakan input yang sangat berharga bagi penguasa di dalam menentukan dan penyempurnaan kebijakan komunikasi pemerintahan.

Sistem libertarianism sangat membuka kesempatan bagi individu-individu untuk meningkatkan kualitas komunikasi, terutama melalui kesertaan (partisipasi) baik bidang politik, ekonomi (kesertaan di bidang pengelolaan media massa sebagai ajang bisnis) maupun di dalam menentukan personel lembaga otoritas melalui *pemilihan*.

Dalam sistem liberal melihat bahwa keterbelakangan bidang sosial ekonomi mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Karena itu, peran individu dalam bidang ekonomi terbuka kesempatan luas. Hal ini berarti bahwa frekuensi komunikasi di bidang bisnis meningkat.

PENUTUP

Teori kepemimpinan yang mengutamakan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak, seperti teori kepemimpinan partisipatif (*participative leadership*) dan teori kepemimpinan servan (*servant leadership*), dapat dilihat sebagai sejalan dengan prinsip libertarianisme. Teori kepemimpinan partisipatif mengutamakan partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan, sehingga anggota tim merasa memiliki tanggung jawab dan kebanggaan atas hasil yang dicapai. Prinsip ini sejalan dengan prinsip libertarianisme yang menempatkan kebebasan individu dalam mengambil keputusan sebagai hal yang sangat penting. Sementara itu, teori kepemimpinan servan menempatkan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan anggota tim, bukan hanya kepentingan pemimpin. Pemimpin sebagai pelayan (*servant*) yang mengabdikan pada kepentingan anggota tim, sehingga anggota tim merasa dihargai dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip libertarianisme yang menempatkan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai hal yang sangat penting.

Secara keseluruhan, prinsip libertarianisme dapat menjadi dasar dalam membangun teori kepemimpinan yang mengutamakan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak, serta memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan anggota tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran, Staley. D & Davis, Denis. K.. *Mass Communication Theory, Foundation*, 2012.
- Ferment, and Future, Sixth Edition*. Chicago: Wadsworth
- Griffin, Emm. (2012). *The First Look at Communication Theories*. New York: McGraw Hill
- Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2021). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice (11th ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.*
- Littlejohn, Stephen. W & Foss, Karen. A (2012). *Teori Komunikasi: Human Communication Ninth Edition*. Jakarta: Salemba Humanika
- Littlejohn, Stephen. W & Foss, Karen. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theories*. California: Sage Publication
- McQuail, Dennis. (2012). *Teori Komunikasi Massa Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika
- Siebert, Fred. S; Theodore, Peterson; Schramm, Wilbur. (1963). *Four Theories of The Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concept of What the Press Should Be and Do*. Chicago: University of Illinois Press
- U. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remadja Rosda Karya, 1991.